

BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 5.1
Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.670817	0.693174	2.410385	0.0223
PDRB	0.184541	0.096675	1.908875	0.0659
PG	0.009394	0.007816	1.201882	0.2388
LOG(PD)	4.84E-08	2.82E-08	1.714786	0.0967
IPM	-0.446101	0.192298	-2.319846	0.0273

Sumber : Data diolah Lampiran 2

Berdasarkan tabel diatas nilai probabilitas PDRB sebesar 0.0659 Pengangguran sebesar 0.2388 Jumlah Penduduk sebesar 0.0967, dan IPM sebesar 0.0273 yang berarti $> 0,01$ bebas dari heteroskodastisitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat adanya masalah multikolinieritas diantara variabel bebas (*Independent*). Menurut Shochrul dkk (2011:35), uji ini berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinieritas.

Tabel 5.2
Uji Multikolinieritas

	PDRB	PG	PD	IPM
PDRB	1.000000	0,071240	-0,067719	0,605565
PG	0,071240	1.000000	-0,427025	0,725910
LOG(PD)	-0,067719	-0,427025	1.000000	-0,407803
IPM	0,605567	0,725910	-0,407803	1.000000

Sumber : Hasil diolah Lampiran 3

B. Analisis Pemilihan Model Terbaik

Menganalisis model data panel terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan yaitu, pendekatan kuadrat terkecil (*Ordinary/Pooled Least Square*), pendekatan Fixed Effect, serta yang terakhir pendekatan Random Effect.

Tiga model regresi yang dapat digunakan diatas adalah untuk mengestimasi data panel, model regresi dengan hasil terbaiklah yang akan digunakan dalam proses analisis. Untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan, maka akan dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Adapun hasil uji statistik sebagai berikut:

1. Uji Chow

Dalam pengujian Uji Chow diestimasi dengan menggunakan efek spesifikasi Fixed. Uji Chow dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan fixed effect atau common effect.

Ho : Model Common Effect

H1 : Model Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas kurang dari alpha 5% maka Ho di tolak, sehingga model menggunakan fixed effect. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi fixed effect sebagai berikut:

Tabel 5.3
Hasil test Fixed Effect Likelihood-Ratio

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	23.680186	(4,26)	0,0000
Cross-section Chi-square	53.738420	4	0,0000

Sumber : Hasil diolah Lampiran 6

Berdasarkan hasil olahan diatas, diketahui probabilitas Chi-Square sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga menyebabkan Ho ditolak, artinya berdasarkan Uji Chow maka model Fixed Effect merupakan model yang sebaiknya digunakan.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah Fixed Effect atau Random Effect yang terpilih, uji ini dilakukan dengan cara membandingkan Chi-Square dan $\alpha = 0,05$. Dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Model Random Effect

H1 : Model Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas lebih besar dari alpha 5% maka Ho di tolak, sehingga model menggunakan random effect, apabila hasil probabilitas lebih kecil dari alpha 5% maka Ho di terima. Hasil dari

estimasi menggunakan efek spesifikasi random effect sebagai berikut:

Tabel 5.4
Uji Hausman Test

Tes Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	94.720744	4	0,0000

Sumber : Data diolah Lampiran 7

Berdasarkan data olahan diatas menghasilkan Chie-Square sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga menolak hipotesisi nol. Maka menurut Uji Hausman, model yang terbaik menggunakan model Fixed effect.

C. Analisis Model Terbaik

Setelah dilakukan berbagai pengujian data, pada akhirnya penelitian ini memilih model analisis terbaik, dimana dengan pemilihan model terbaik maka akan dihasilkan hasil regresi pada panel data yang bisa membuktikan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, di tunjukan selengkapnya dalam tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5
Hasil Estimasi Model

Variabel Dependent: Kemiskinan	Model	
	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta (C)	5.281382	5.959893
Standar error	0.227680	0.130184
Probabilitas	0.0000	0,0000
PDRB	-0.000350	-0.058100
Standar error	0.023034	0.021800

Variabel Dependent: Kemiskinan	Model	
	Fixed Effect	Random Effect
Probabilitas	0.0880	0,0123
PG	0.010681	-0.018696
Standar error	0.007996	0.007643
Probabilitas	0.0132	0,0205
LOG(PD)	0.016900	0.024647
Standar error	0.005750	0.003178
Probabilitas	0.0068	0,0000
IPM	-0.037488	-0.042165
Standar error	0.003566	0.002768
Probabilitas	0,0000	0,0000
R²	0.990232	0.925706
F-statistik	93.45070	329.4773
Probabilitas	0.000000	0.000000
Durbin-watson stat	1.457046	0.619331

Sumber : Data diolah

Berdasarkan uji spesifikasi model dari kedua analisis yang menggunakan uji Likeli-hood dan uji hausman ditemukan bahwa uji likeli-hood menyarankan fixed effect model serta uji hausman juga menyarankan untuk menggunakan fixed effect. Terlihat pada tabel 5.5 perbandingan antara uji fixed effect serta random effect probabilitas setiap variabel dependen dan R-Square bahwa pemilihan model regresi yang digunakan dalam analisis determinan terhadap kemiskinan di DIY adalah Random Effect. Alasan memilih Fixed Effect di sebabkan nilai dari koefisien determinan, seberapa besar variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil koefisien determinan dari Fixed effect sebesar 0,990232 dimana lebih besar dari hasil estimasi Random effect.

D. Hasil Estimasi Model Data Panel

Menurut uji spesifikasi model yang telah dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman keduanya menyarankan untuk menggunakan Fixed Effect Model. Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dalam uji asumsi klasik, jadi hasil yang diperoleh setelah estimasi konsisten dan tidak bias.

Tabel 5.6
Hasil Estimasi Model Fixed Effect

Variabel	Model
Dependent:	Fixed Effect
Kemiskinan	
Konstanta (C)	5.281382
Standar error	0.227680
Probabilitas	0.0000
PDRB	-0.000350
Standar error	0.023034
Probabilitas	0.0880
LOG(PG)	0.010681
Standar error	0.007996
Probabilitas	0.0132
PD	0.016900
Standar error	0.005750
Probabilitas	0.0068
IPM	-0.037488
Standar error	0.003566
Probabilitas	0,0000
R²	0.990232
F-statistik	93.45070
Probabilitas	0.000000
Durbin-watson stat	1.457046

Sumber : Data diolah Lampiran 4

Dari hasil regresi diatas dapat dibuat model analisis data panel terhadap analisis pengaruh PDRB, Pengangguran (PG), Jumlah Penduduk (PD), dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa

Yogyakarta periode tahun 2008-2014 dalam 4 kabupaten dan 1 kota madya. Dari hasil regresi, maka dapat disimpulkan secara menyeluruh diperoleh hasil persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$KM = \beta_0 + \beta_1 * PDRB + \beta_2 * PG + \beta_3 * PD + \beta_4 * IPM + et \dots\dots\dots(5.1)$$

$$KEMISKINAN = 5.281382 - 0.000350 PDRB + 0.010681 PG + 0.016900 PD - 0.037488 IPM$$

Dimana :

KM : Kemiskinan

PDRB: Produk Domestik Regional Bruto

PG : Pengangguran

PD : Jumlah Penduduk

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

β_0 : Konstanta

$\beta_{1...4}$: Koefisien Parameter

et : Disturbance Error

Dari hasil estimasi pada tabel diatas, dapat dibuat model data panel terhadap pengaruh PDRB, Pengangguran, Jumlah penduduk, dan IPM terhadap kemiskinan, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$KEMISKINAN_KULONPROGO = 0.190130 \text{ (Efek Wilayah)} + 5.281382 - 0.000350 * PDRB_Kulonprogo + 0.010681 * PG_Kulonprogo + 0.016900 * LOG (PD_Kulonprogo) - 0.037488 * IPM_Kulonprogo.$$

$$KEMISKINAN_BANTUL = 0.103515 \text{ (Efek Wilayah)} + 5.281382 - 0.000350 * PDRB_Bantul + 0.010681 * PG_Bantul + 0.016900 * LOG (PD_Bantul) - 0.037488 * IPM_Bantul.$$

$$\text{KEMISKINAN_GUNUNGKIDUL} = 0.021289 \text{ (Efek Wilayah)} + 5.281382 - 0.000350*\text{PDRB_Gunungkidul} + 0.010681*\text{PG_Gunungkidul} + 0.016900*\text{LOG (PD_Gunungkidul)} - 0.037488*\text{IPM_Gunungkidul}.$$

$$\text{KEMISKINAN_SLEMAN} = -0.116902 \text{ (Efek Wilayah)} + 5.281382 - 0.000350*\text{PDRB_Sleman} + 0.010681*\text{PG_Sleman} + 0.016900*\text{LOG (PD_Sleman)} - 0.037488*\text{IPM_Sleman}.$$

$$\text{KEMISKINAN_YOGYAKARTA} = -0.198032 \text{ (Efek Wilayah)} + 5.281382 - 0.000350*\text{PDRB_Yogyakarta} + 0.010681*\text{PG_Yogyakarta} + 0.016900*\text{LOG (PD_Yogyakarta)} - 0.037488*\text{IPM_Yogyakarta}.$$

Pada hasil estimasi diatas, pengaruh *cross-section* pada setiap kabupaten/kota terhadap kemiskinan berbeda-beda. Pada kabupaten Kulon Progo, kabupaten Bantul, serta kabupaten Gunung Kidul menunjukkan adanya pengaruh *cross-section* (efek wilayah operasional) yang positif yaitu kabupaten Kulo Progo sebesar 0.190130, kabupaten Bantul sebesar 0.103515, kabupaten Gunung Kidul sebesar 0.021289. Sementara itu kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta memiliki pengaruh *cross-section* (efek wilayah operasional) yang negatif yaitu pada kabupaten Sleman sebesar - 0.116902, dan kota Yogyakarta sebesar - 0.198032. dari perhitungan 4 kabupaten serta 1 kota madya di Yogyakarta, jika diurutkan yang memberi pengaruh kemiskinan terbesar yaitu pada kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 0.190130 dan yang paling kecil memberikan pengaruh terhadap kemiskinan yaitu pada daerah kabupaten Sleman sebesar - 0.116902.

E. Uji Statistik

1. Koefisien Determinan (R^2)

Hasil uji koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangi variabel terikat (dependent) secara statistik

Tabel 5.7
Uji Koefisien Determinan (R^2)

Regresi Fixed Effect	
Prob>F	0.000000
F Statistik	329.4773
Error Correlated	0.110103
R-Square	0.990232
Adj R-Squared	0.915800

Sumber: Data diolah Lampiran 4

Berdasarkan tabel diatas nilai R-Square sebesar 0.990232, yang berarti perubahan kemiskinan daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 99,02% yang dipengaruhi oleh variabel PDRB, Pengangguran, Jumlah penduduk, dan IPM. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,0098% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

2. Uji Signifikan Secara Keseluruhan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel bebas (independent) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent*).

Dilihat dari tabel 5.8 yang menunjukkan besarnya F-Statistik sebesar 329.4773 serta nilai probabilitas F sebesar 0,00000. Maka nilai Prob>F lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan variabel bebas

(*independent*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent*).

Tabel 5.8
Uji signifikan Secara Keseluruhan
(Uji F)

Regresi Fixed Effect	
Prob>F	0.000000
F-Statistik	329.4773
Error Correlated	0.110103
R-Square	0.990232
Adj R-Squared	0.915800

Sumber : Data diolah Lampiran 4

3. Uji Signifikan Individu (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (*independent*) yaitu PDRB, pengangguran, jumlah penduduk, dan IPM memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu kemiskinan.

Tabel 5.9
Uji Signifikan Individual (Uji T)

	Coefisien	Prob.	Standart Prob.
PDRB	-0.000350	0.0880	10%
PG	0.010681	0.0132	5%
LOG(PD)	0.016900	0.0068	10%
IPM	-0.037488	0.0000	10%

Sumber : Hasil diolah lampiran 4

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa Koefisien regresi untuk variabel PDRB sebesar -0.000350 dengan probabilitas 0,0880 yang artinya signifikan pada $\alpha = 10\%$, pada variabel Pengangguran memiliki koefisien regresi sebesar 0.010681 dengan probabilitas 0,0132 yang artinya signifikan pada $\alpha = 5\%$, variabel Jumlah

penduduk (PD) tingkat koefisien regresi sebesar 0.016900 dengan probabilitas 0,0068 yang artinya signifikan pada $\alpha = 1\%$, kemudian pada variabel IPM tingkat koefisien regresi sebesar -0.037488 dengan probabilitas 0,0000 yang artinya signifikan pada $\alpha = 1\%$.

Jadi variabel Jumlah penduduk (PD), dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel PDRB, dan Pengangguran (PG) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Pembahasan

Kebijakan Pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta upaya penanggulangnya sangat diperlukan. Beberapa cara seperti memandu berbagai kebijakan, kegiatan pembangunan, dan berbagai program yang tersebar di berbagai sektor baik di pusat maupun kebijakan Pemerintah DIY. Menurut Gunawan Sumodiningrat dalam pengentasan kemiskinan dapat di kategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Kebijakan secara langsung, yang mencakup (1) pengembangan data dasar (*base data*) penduduk miskin dalam penentuan kelompok sasaran (*targeting*). (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). (3) penciptaan kesempatan kerja. (4) Program Pembangunan Wilayah (PPW). (5) pengalokasian anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBD, dan (6) pelayanan perkreditan seperti KUR.

- b. Kebijakan secara tidak langsung yang dilakukan pemerintah DIY meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi. (2) mengendalikan jumlah penduduk. (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok dari masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Kebijakan tidak langsung juga mampu mendukung dan bersinergi dengan kebijakan langsung.

Gunawan Sumodiningrat menjelaskan bahwa sangat diperlukan strategi kebijakan pemerintah DIY yang memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian Nasional, sehingga terjadi perubahan struktur yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguat kelembagaan, pemberdaya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal DIY. Progm yang dipilih oleh pemerintah harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi serta peningkatan perekonomian rakyat DIY, seperti pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIY.

Program ini harus diwujudkan dalam berbagai langkah dan strategi yang diarahkan langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai

sebab-sebab timbulnya permasalahan kemiskinan tersebut terjadi (Saragih, 2015).

Hasil riset Ahmad Fatony menjelaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis *participatory poverty assessment* di DIY adalah efektif dilakukan, karena pendekatan tersebut didasari sebagai pendekatan yang memadai dalam pemberdayaan masyarakat DIY. Namun pada tingkat implementasi, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, masih kurang dalam melibatkan penduduk miskin DIY sebagai subyek atas kegiatan untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Pada umumnya yang memperoleh manfaat dari program kebijakan pengentasan kemiskinan bukanlah orang-orang miskin, tetapi mereka yang memiliki akses informasi dan dekat dengan kekuasaan lokal (Fatony, 2011).

Program perlindungan sosial di DIY yang ada tidak mencukupi dalam menurunkan tingkat resiko bagi keluarga miskin, walaupun memberikan manfaat pada keluarga yang relatif sedikit lebih mampu. Karena pada dasarnya perlindungan sosial yang dilakukan bersifat jangka pendek untuk mempertahankan daya beli mereka dengan dana yang relative kecil, seperti bantuan kepada fakir miskin dan bantuan langsung tunai (BLT). Kondisi ini dapat diperbaiki dengan menyediakan program perlindungan sosial yang lebih bermanfaat bagi penduduk miskin, serta kelompok masyarakat yang benar-benar rentan dalam hal kemiskinan (Saragih, 2015).

Tabel 5.10
Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (BSBK) Di DIY

Ket.	BLSM 2012 (Bantuan tunai)	Raskin (Beras/pangan)	Jamkesmas (Asuransi Kesehatan)	BSM Pendidikan	PKH (Bantuan tunai Bersyarat)
Jenis Transfer	Tunai	Beras bersubsidi	Biaya pelayanan kesehatan gratis	Tunai	Tunai dan bersyarat
Sasaran	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Miskin dan hampir miskin	Murid dan RT miskin	Rumah tangga sangat miskin (RTSM)
Jumlah Penerima	18,5 juta RT	17,5 juta RT	18,2 juta RT	4.560.501	1,5 juta RTSM
Jumlah Bantuan	Rp150.000 per bulan	14 kg beras per bulan	Tidak terbatas	Rp561.759 per bulan	Rp1.287.000 per tahun
Lembaga Pelaksana Utama	Kemensos	Bulog dankemendagri	Kemenkes	Kemendiknas dan Kemenag	Kemensos

Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY 2013, dan Penjelasan dari Pejabat Dinas Sosial Provinsi DIY dalam Saragih 2011.

Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) telah membuat program penanggulangan kemiskinan diseluruh Indonesia termasuk DIY. Selain itu, Pemerintah DIY bekerjasama dengan Pemerintah pusat melakukan program bantuan sosial berbasis keluarga (BSBK) yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan prioritas pembangunan nasional, diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga (BSBK). Program bantuan sosial berbasis keluarga antara lain, 1) program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak dan belita terlantar (AB). 2) program anak dengan

kecacatan (ADK). 3) program anak berhadapan dengan hukum (ABH), 4) program anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi didalam dan diluar panti sosial. Program ini dapat berbentuk bantuan uang tunai, raskin, jamkesmas, bantuan pendidikan bagi siswa miskin, dan bantuan tunai bersyarat dalam program keluarga harapan.

Tabel 5.11
Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan di DIY,
Tahun 2013

No	Kabupaten/kota	PNPM/BLM	APBN	APBD
1.	Kab. Bantul	24.475,00	23.251,00	1.223,75
2.	Kab. Gunung Kidul	48.500,00	46.075,00	2.425,00
3.	Kab. Kulon Progo	30.275,00	28.761,00	1.513,75
4.	Kab. Sleman	17.875,00	16.981,00	893,75
5.	Kota Yogyakarta	5.475,00	5.201,25	273,75
	Total Provinsi DIY (78 kecamatan)	126.600,00	120.270,00	6.330,00

Sumber: Daftar lokasi PNPM Mandiri Provinsi DIY tahun Anggaran 2013, Menkokesra dalam Saragih 2015

Disamping itu, data dari kemenkokesra menunjukkan bahwa realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013 dengan total dana PNPM/BLM berjumlah Rp126,600 miliar. Dalam APBN tahun anggaran 2013 juga dialokasikan sebanyak Rp120,270 miliar, dan dalam APBD DIY tahun anggaran 2013 dialokasikan sebanyak Rp6,330 miliar, yang dirinci per kabupaten/kota di tunjukkan pada tabel 5.11.

Kabupaten Gunung Kidul merupakan wilayah termiskin di DIY yang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai skema program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Program pemda yang Kabupaten Gunung Kidul, skema yang masuk desa antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), program mandiri pangan, kredit usaha mikro, hingga program infrastruktur fisik. Sedangkan dari pemerintah DIY, terdapat program bantuan seperti peternakan, subsidi pembangunan infrastruktur desa, pendidikan, dan kesehatan.

Banyak program yang masuk ke Kabupaten Gunung Kidul ternyata masih belum memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berarti. Angka kemiskinan masih cukup tinggi yakni 25,96% dari total jumlah penduduk. Angka kemiskinan ini tak bergerak jauh dari sebelumnya. Akar sebabnya, program penanggulangan kemiskinan masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pedesaan, dimana pembangunan infrastruktur menyedot porsi terbesar. Pembangunan jalan misalnya, dibangun untuk memperlancar transportasi, yang selanjutnya akan meningkatkan akses masyarakat ke pasar dan memberdayakan ekonomi desa secara umum. Dengan lahirnya Undang-undang tentang Pemerintahan Desa, maka desa-desa di seluruh kabupaten/kota di DIY diharapkan dapat berkembang dari sisi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Bappeda DIY, pemerintah DIY pada tahun anggaran 2013 menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 46

miliar untuk 46.000 kepala keluarga (KK) miskin produktif, yakni Kota Yogyakarta sebesar Rp 1,9 miliar, kabupaten Bantul Rp 13 miliar, kabupaten Kulon Progo Rp6,7 miliar, kabupaten Gunung Kidul Rp 16,6 miliar dan kabupaten Sleman sebesar Rp 8,1 miliar. Sementara hasil kajian BPs di lapangan bahwa untuk menekan angka kemiskinan di DIY hingga 2% pada tahun 2013, merekomendasikan harus member insentif atau bantuan sosial kepada 46.000 warga miskin. Sedangkan jika ingin menurunkan sebesar 3% angka kemiskinan maka dibutuhkan intervensi anggaran dari APBD sampai 60.000 warga miskin tergantung pada kemampuan APBD DIY (Saragih, 2015).

Berdasarkan hasil estimasi atau penelitian yang dilakukan dapat dijadikan suatu analisis serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (PDRB, Pengangguran, Jumlah Penduduk, dan IPM) terhadap tingkat kemiskinan di DIY yang di interpretasikan sebagai berikut:

1. PDRB terhadap Kemiskinan di DIY

Berdasarkan penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar -0.000350 terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti apabila terjadi kenaikan pada PDRB 1%, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -0.000350% di Kabupaten/Kota di DIY.

Pengaruh negatif PDRB terhadap kemiskinan dapat dijelaskan, yaitu ketika pertumbuhan output suatu daerah meningkat hal ini berarti

terjadi kenaikan produksi dimana peningkatan produksi akan memperluas lapangan pekerjaan, sehingga menurunkan tingkat pengangguran, penurunan tingkat pengangguran menandakan bahwa banyaknya penduduk yang terserap dalam dunia kerja sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di DIY.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Whisnu Adi Saputra (2011) yang menunjukkan pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan

2. Pengangguran terhadap Kemiskinan di DIY

Berdasarkan penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar 0.010681 terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti apabila terjadi kenaikan pada Pengangguran 1%, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.010681% di Kabupaten/Kota di DIY, dengan menggunakan asumsi tidak ada perubahan dalam jumlah variabel bebas.

Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal ini terjadi ketika banyaknya masyarakat yang menganggur dalam suatu daerah akan menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat daya beli masyarakat menurun, hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Angga Tri Widiastuti (2016) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara Pengangguran dengan tingkat kemiskinan.

3. Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di DIY

Berdasarkan hasil data yang diolah dalam penelitian ini, terlihat pada variabel jumlah penduduk (PD) menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap kemiskinan sebesar 0.016900, yang artinya jika terjadi peningkatan jumlah penduduk 1% maka akan peningkatan sebesar 0.016900% dengan menggunakan asumsi tidak ada perubahan dalam jumlah variabel bebas.

Hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap kemiskinan terjadi ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk tanpa disertai perluasan lapangan pekerjaan, dimana jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada banyaknya pengangguran, karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menyerap banyaknya jumlah penduduk yang ada. Selain itu pertumbuhan jumlah penduduk yang terus-menerus tanpa disertai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka akan membuat seseorang sulit dalam mengakses pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi, pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Jika hal ini terus terjadi maka peningkatan jumlah penduduk hanya akan meningkatkan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Whisnu Adhi Saputra (2011) yang menunjukkan hubungan yang positif antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan.

4. IPM terhadap Kemiskinan di DIY

Berdasarkan hasil data yang diolah dalam penelitian ini, terlihat pada variabel IPM menunjukkan hasil yang negatif signifikan terhadap kemiskinan sebesar -0.037488, yang artinya jika terjadi peningkatan IPM 1% maka akan penurunan sebesar -0.037488% dengan menggunakan asumsi tidak ada perubahan dalam jumlah variabel bebas.

IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, ketika tingkat harapan hidup tinggi maka hal itu menandakan tingkat kesehatan dalam kondisi baik, sehingga mampu untuk bekerja secara optimal yang dapat meningkatkan produktivitas, meningkatnya produktivitas akan meningkatkan output dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain tingkat harapan hidup, tingginya tingkat pendidikan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, jika pendidikan tinggi maka masyarakat akan mampu untuk berinovasi dalam efisiensi produksi, yang dapat meningkatkan produksi sehingga meningkatkan pendapatan, peningkatan pendapatan maka daya beli masyarakat meningkat, daya beli naik menjadikan tingkat kesejahteraan meningkat yang berarti berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anggatri Widiastuti (2016) yang menunjukkan pengaruh yang negatif antara IPM dengan tingkat kemiskinan.